

**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD)
DENGAN POLITICAL BACKGROUND, AKUNTABILITAS
PUBLIK DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK
SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
(Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Pelalawan)**

Oleh :

Elsi Arianti

Pembimbing : Ria Nelly Sari dan Supriono

Faculty of Economics, Riau University

Pekanbaru, Indonesia

e-mail : Elsiarianti@gmail.com

*The Effect of The Board Knowledge About The Budget Of The Regional Financial
Supervision (APBD) with The Political Background, Accountability,
Transparency And Public Policyas A Moderating Variable
(Empirical Study On DPRD in Pelalawan)*

ABSTRACT

This study aims to examine the Council Influence Knowledge of the Financial Supervision Budget (APBD) Backgrounds Politics, Accountability, Transparency as moderating variable on all members of Parliament in the area Palalawan. Using survey data from 35 questionnaires distributed, which can be processed is 33 questionnaire. used multiple linear regression analysis with SPSS 20.0. Data analysis techniques to test hypotheses using multiple linear regression analysis approach. Hypothesis testing results show that the understanding of accounting, The results show that there is a significant negative influence between knowledge of the board of the Financial Supervision budget (APBD) the statistical value of 0,017. use political backgrounds have knowledge about the effect of the relationship between the budget and the Financial Supervision (Budget) in 0,016. And the use of statistical values of accountability has the effect of knowledge of the relationship between the budget and the Financial Supervision (APBD) in the 0,030 statistical value, transparency has no effect relationship between knowledge about the budget and the Financial Supervision (APBD) in the 0,584 statistical value.

Keywords: *Controller, Knowledge, Political Background, Accountability, and Transparency.*

PENDAHULUAN

Desentralisasi keuangan dan otonomi daerah merupakan salah satu agenda dari reformasi. Agar

anggaran pemerintah daerah berjalan sesuai rencana dan ketentuan, diperlukan pengawasan yang merata disetiap aspek perencanaan, apakah perencanaan tersebut berjalan secara

efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2011). Pengawasan yang sangat kritis pada saat tahap perencanaan anggaran tersebut adalah perlunya penguatan pada sisi pengawasan.

Undang-undang No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Pemerintah Daerah) sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (di pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna (Makueda, 1981 dalam Witono, 2003).

Dalam pelaksanaan pengawasan keuangan daerah, pengetahuan dewan sangat diperlukan untuk menghindari pemborosan dan kebocoran anggaran. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kualitas dewan yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan pengetahuan untuk masa yang akan datang. Salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan pengawasan keuangan daerah.

Political Background merupakan latar belakang dari pengalaman seseorang dalam berkecimpung di dunia politik. Seorang anggota dewan harus mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan. Penelitian Jaka Winarna dan Sri Murni (2007) menyimpulkan bahwa political background dan personal background tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota dewan.

Peran lembaga eksekutif bagi pelayanan publik terus meningkat setiap tahun, hal ini tentunya akan menuntut lembaga legislatif dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi. Untuk mendapatkan kinerja yang baik dituntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Indikator sumber daya manusia yang berkualitas diantaranya adalah latar belakang pendidikan dan political background, Syahrudin dan Taifur (2001) menyatakan bahwa kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsinya tidak saja ditentukan oleh kualitas anggota DPRD yang ada, tetapi dipengaruhi pula oleh perilaku (moral) anggota DPRD.

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pengawasan keuangan mengacu pada penelitian Paramita dan Andriyani (2010). Keterlibatan dewan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD, pelaksanaan analisis politik terhadap penyusunan APBD, keterlibatan anggota dewan dalam pengesahan APBD, kemampuan menjelaskan APBD yang telah disusun, keyakinan dewan bahwa

APBD telah memiliki transparan, keterlibatan anggota dewan dalam memantau pelaksanaan APBD, mengevaluasi laporan pertanggung jawaban yang disusun pemerintah daerah, evaluasi yang dilakukan anggota dewan terhadap faktor-faktor atau alasan yang mendorong timbulnya revisi APBD, pemerintah keterangan oleh anggota dewan terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) APBD yang disampaikan Bupati/Walikota dan tindak lanjut terjadi kegagalan dalam LKPJ APBD.

Fenomena yang ditemukan di Kabupaten Pelalawan adalah masih rendahnya pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran juga latar belakang anggota DPRD kurang mendukung pengetahuan yang dimilikinya khususnya tentang anggaran, hal ini tentunya berakibat pada pengawasan APBD. Selanjutnya fungsi pengawasan APBD oleh dewan maupun masyarakat juga masih rendah sehingga sering terjadi penyalahgunaan penggunaan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari temuan BPK Tahun 2014 yaitu (1) penggunaan Langsung Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hasil Klaim dari BPJS dan Jamkesda pada RSUD Selasih dan terdapat kelebihan pembayaran Jasa Pelayanan; (2) Realisasi Belanja Pegawai tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Tahun Anggaran 2014 tidak sesuai ketentuan pemberian tambahan penghasilan; (3) Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah tidak sesuai ketentuan tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah; (4) Pemberian Tunjangan Pembinaan Aparatur

Pemerintahan Lurah/Kecamatan dalam bentuk honorarium tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya; (5) Penyediaan jasa tenaga pendidik dan kependidikan tidak sesuai ketentuan penganggaran dan besaran honorarium belum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; (6) Pemberian Hibah kepada Pondok Pesantren Modern Manbaul Ma'arif terus menerus dan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah uang tidak diyakini kewajarannya; dan (7) Belanja Bantuan Sosial perlengkapan sekolah untuk siswa miskin tidak dapat segera dimanfaatkan siswa.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sri Rustiya Ningsih dan Dwi Handayani (2013). Namun variabel partisipasi masyarakat tidak penulis gunakan. Penulis menggantinya dengan variable political background dan akuntabilitas public sesuai dengan penelitian Jaka Winarna dan Sri Murni (2007) serta obyek dan periode penelitian yang berbeda. Pada penelitian terdahulu obyeknya adalah DPRD di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan barat sedangkan penelitian ini di DPRD Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tahun 2015.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1). Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD)? 2). Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dimoderasi oleh political background? 3). Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dimoderasi oleh akuntabilitas

publik? 4). Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan transparansi sebagai pemoderasi?

Tujuan penelitian ini antara lain: 1). Untuk menguji apakah pengetahuan dewan tentang anggaran akan mempengaruhi dewan dalam pengawasan keuangan daerah (APBD), 2). Untuk menganalisis apakah political background akan mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD), 3). Untuk menganalisis apakah akuntabilitas publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). 4). Untuk memberikan bukti empiris bahwa transparansi kebijakan publik akan mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

TELAAH PUSTAKA

Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan

pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001). Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD.

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Secara teoritik, pelaksanaan fungsi-fungsi beserat hak, tugas, dan wewenang DPRD secara efektif hanya mungkin dilakukan oleh para anggotanya yang mempunyai tingkat kualitas tinggi. Hal ini tidak cukup hanya memiliki pengalaman dibidang sosial kemasyarakatan dan politik, melainkan juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan substansi bidang tugas lembaga legislatif yang menjadi tanggungjawabnya (Yudoyono, 2003:63).

Political Background

Menurut Winarna (2007) terdapat beberapa pengertian political background, yaitu : 1) Sejarah dan konsep yang ada pada diri seseorang didalam dunia politik, 2) Keterangan tentang seseorang bagaimana pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam Negara, 3) Keterangan mengenai perjalanan politik seseorang untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun konstitusional.

Dalam menjalankan tugasnya anggota DPRD diharuskan mengikuti aturan kerja yang telah ditetapkan sesuai bidang masing-masing, di sinilah latar belakang politik

terkadang menyebabkan perbedaan sudut pandang bahkan terjadinya perselisihan.

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas diartikan sebagai prinsip pertanggung jawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya.

Mahmudi (2005:10) dalam Hasibuan (2010), menyatakan dimensi-dimensi akuntabilitas pada organisasi sektor publik :

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity & legality*).
2. Akuntabilitas manajerial (*manajerial accountability*).
3. Akuntabilitas program (*program accountability*).
4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) Akuntabilitas keuangan (*financial accountability*).

Transparansi Kebijakan publik

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang yang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip Transparansi memiliki 2 aspek :

- 1) Komunikasi publik oleh pemerintah
- 2) Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Mardiasmo (2003) menyebutkan bahwa, kerangka konseptual dalam membangun transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari: 1) Adanya system pelaporan keuangan; 2) Adanya system pengukuran kinerja; 3) Dilakukannya auditing sektor public; 4) berfungsinya saluran akuntabilitas public (*channel of accountability*).

Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Yudono (2002) mengatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan anggaran. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

2. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Political Background Sebagai Pemoderasi.

Dalam menjalankan tugasnya anggota DPRD diharuskan mengikuti aturan kerja yang telah ditetapkan sesuai bidang masing-masing, di sinilah latar belakang politik terkadang menyebabkan perbedaan sudut pandang bahkan terjadinya perselisihan. Seorang anggota dewan harus mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan. DPRD akan dapat memainkan perannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada pada kualifikasi ideal dalam arti memahami benar hak, tugas dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan pengalaman dibidang politik dan pemerintahan yang baik (Yudoyono, 2000). Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan Political Background sebagai Pemoderasi

3. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Akuntabilitas Sebagai Pemoderasi

Adanya akuntabilitas publik yang baik dalam menjaga kualitas pengawasan terhadap APBD, maka pengawasan terhadap APBD juga akan semakin baik seperti hasil penelitian Novatiani dan Lestari (2014) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengawasan anggaran. Penelitian (Coryanata, 2007; Sopanah dan Wahyudi, 2007), menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan

APBD dimoderasi oleh akuntabilitas. Hal ini peneliti menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam pengawasan APBD karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang di anggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang adakarena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan Akuntabilitas sebagai Pemoderasi

4. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Transparansi Sebagai Pemoderasi.

Mardiasmo (2002) dalam Mutia (2008) mengemukakan bahwa pemerintah dikatakan transparansi jika pemerintah melakukan pertanggungjawaban secara rutin kepada rakyat/DPRD mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya, pemerintah dengan senang hati memberikan informasi seluas mungkin mengenai kinerjanya baik masalah pelayanan pada rakyatnya maupun masalah keuangannya dan pemerintah dengan terbuka selalu mengadakan dialog dengan rakyatnya secara rutin mengenai seluruh produk kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakannya. Isma Coryanata (2007) meneliti tentang pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan

pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Dengan demikian dapat dipahami bahwa transparansi kebijakan publik merupakan akses informasi bagi publik dan disisi lain juga dapat menjadi salah satu penunjang kontrol masyarakat atas kinerja pemerintah maupun unit-unit kerjanya, yang khususnya kinerja anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Sehingga diperoleh hipotesis kedua sebagai berikut:

H4: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dimoderating oleh transparansi.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pelalawan, jumlah DPRD Kabupaten Pelalawan berjumlah 35 orang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu dengan penyebaran pertanyaan dalam bentuk kuesioner kepada DPRD Kabupaten Pelalawan periode 2014-2019.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

pemilihan sampel non probability sampling dengan sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Definisi Operasionalisasi Variabel dan Pengukurannya

Pada penelitian ini terdapat lima variabel yang akan diteliti, yaitu pengawasan keuangan daerah (APBD), pengetahuan anggota dewan tentang anggaran, political background, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik.

Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Y)

Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. DPRD sebagai wakil rakyat diamanahkan untuk melakukan pengawasan, baik itu pada saat proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi pemborosan anggaran. Variable ini diukur dengan 11 (sebelas) pertanyaan. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variable pengawasan keuangan daerah mengacu pada penelitian Iin Febrina dan Simson Warimon (2006). instrumen yang digunakan untuk mengukur pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan menggunakan Skala Likert dengan 5 (lima) alternatif jawaban yaitu : 5 (SS= Sangat Setuju), 4 (S= Setuju), 3 (KS= Kurang Setuju), 2 (TS= Tidak Setuju), 1 (STS= Sangat Tidak Setuju).

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X)

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki anggota dewan dalam menyusun (RAPBD/APBD) yang dijadikan sebagai dasar untuk dapat mendeteksi keborosan atau kegagalan dari anggaran dalam pelaksanaannya. Variabel ini diukur dengan 10 (sepuluh) pertanyaan dan Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variable pengetahuan ini mengacu kepada penelitian Paramita dan Indryani (2010). Instrumen yang digunakan untuk mengukur pengetahuan dewan tentang anggaran dengan menggunakan Skala Likert dengan 5 (lima) alternatif jawaban yaitu : 5 (SS= Sangat Setuju), 4 (S= Setuju), 3 (KS= Kurang Setuju), 2 (TS= Tidak Setuju), 1 (STS= Sangat Tidak Setuju).

Political Background (M₁)

Political Background didefinisikan sebagai sejarah atau keterangan yang ada apa diri seseorang didalam dunia politik yang terdiri dari beberapa dimensi seperti pengalaman politik, pengalaman di DPRD, latar belakang partai politik, latar belakang ideologi partai politik, dan asal komisi.

Variabel ini diukur dengan 8 (empat) pertanyaan. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel political background mengacu pada penelitian Jaka Winarna dan Indah Sari (2007). Instrumen yang digunakan untuk mengukur political background dengan menggunakan Skala Likert dengan 5 (lima) alternatif jawaban yaitu : 5 (SS= Sangat Setuju), 4 (S=

Setuju), 3 (KS= Kurang Setuju), 2 (TS= Tidak Setuju), 1 (STS= Sangat Tidak Setuju).

Akuntabilitas Publik (M₂)

akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban yang dimiliki oleh pihak pemegang amanah (dewan) untuk dapat mempertanggung jawabkan, menyajikan laporan, dan mengungkapkan skala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan amanah (masyarakat) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban yang dimiliki oleh pihak pemegang amanah (dewan) untuk dapat mempertanggung jawabkan

Variabel ini diukur dengan 8 (delapan) pertanyaan dan Indikator-indikator dalam pengukuran variable akuntabilitas mengacu pada penelitian Sopanah (2011). Instrumen yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas dengan menggunakan Skala Likert dengan 5 (lima) alternatif jawaban yaitu : 5 (SS= Sangat Setuju), 4 (S= Setuju), 3 (KS= Kurang Setuju), 2 (TS= Tidak Setuju), 1 (STS= Sangat Tidak Setuju).

Transparansi Kebijakan Publik (M₃)

Transparansi didefinisikan sebagai adanya keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagai keputusan yang mempunyai tujuan tertentu.

Variabel ini diukur dengan 23 (dua puluh tiga) item pernyataan.

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel transparansi kebijakan publik mengacu pada penelitian Yulinda Devi Pramita dan Lilik Indyani (2010). Instrumen yang digunakan untuk mengukur transparansi kebijakan publik dengan menggunakan Skala Likert dengan 5 (lima) alternatif jawaban yaitu : 5 (SS= Sangat Setuju), 4 (S= Setuju), 3 (KS= Kurang Setuju), 2 (TS= Tidak Setuju), 1 (STS= Sangat Tidak Setuju).

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda (*multiple regression*) guna untuk mengetahui pengaruh variable - variabel independen terhadap dependen dengan bantuan SPSS (*Statistical Product Service Solution*) versi 20.00 Bentuk persamaan umum regresi linier berganda:

$$Y = a + b_1X + b_2M_2 + b_3M_3 + b_4M_4 + b_5XM_1 + b_6XM_2 + b_7XM_3 + e$$

Y= Pengawasan Keuangan Daerah

a = Konstanta

β = Koefisien regresi

e = Standar error

X= Pengetahuan dewan tentang anggaran

M₁=political background

M₂=akuntabilitas publik

M₃=Transparansi kebijakan publik

X.M₁= interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan political background

X.M₂= interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan akuntabilitas

X.M₃= interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan gambaran tentang ringkasan data dari masing-masing variabel yang akan masuk dalam proses pengujian, dengan tujuannya yaitu memudahkan dalam memahami data dengan dimulai dari jumlah data (N), nilai rata-rata dan standar penyimpangan data (Standar Deviasi).

Tabel 1
Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Y	33	22	53	38.48	6.394
X	33	25	50	34.67	5.764
M1	33	14	36	24.33	4.884
M2	33	11	37	24.33	6.377
M3	33	32	96	77.33	9.505
Valid N	33				

Sumber: Data Olahan, 2016

Nilai rata-rata kelima variabel tersebut lebih besar daripada nilai standar deviasinya, sehingga ini menunjukan bahwa bahwa penyebaran data sudah baik.

Hasil Uji Validitas Data

Pada penelitian ini pengujian validitas data menggunakan nilai correlation item-Total correlatin. Nilai r hitung yang diperoleh dalam penelitian ini dibandingkan dengan nilai r tabel untuk menguji validitas data. Jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Pada penelitian ini nilai r_{tabel} adalah 0,344.

Dari hasil pengelolaan data dengan bantuan SPSS 20.0, Dari tabel tersebut terbukti bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dalam variabel penelitian ini lulus uji validitas.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Autokorelasi

Untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada berikut ini.

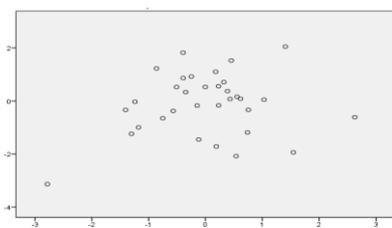
Tabel 2
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.807 ^a	.651	.553	4.273	1.902

Sumber: Hasil Olah Data, 2016

Hasil uji Durbin Watson menunjukkan angka 1.902 untuk dependen variabel adopsi, berarti DW berada -2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi, dengan demikian tidak ada autokorelasi dan data menunjukkan layak untuk diteliti. Untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada tabel diatas.

Gambar 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Olah Data SPSS, 2016

Dari grafik gambar 1 diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dari heteroskedastisitas.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Hasil uji multikolonieritas dapat dilihata pada berikut ini.

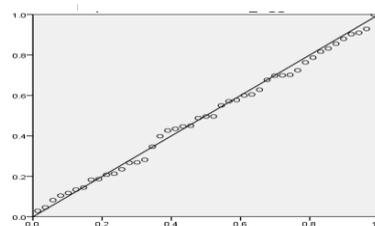
Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran(X)	.834	1.198
1 Political Background (M1)	.908	1.102
Akuntabilitas (M2)	.924	1.082
1 Transparansi Kebijakan Publik (M3)	.848	1.179

Sumber : Data Olahan, 2016

Dari tabel 3 diketahui bahwa nilai ke empat variabel ini memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10,00. Maka dapt disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas dalam penelitian ini.

Gambar 2
Hasil Uji Normalitas



Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa sebaran data berada disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Oleh dari

Pada gambar 2 terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, karena itu model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Analisis Regresi Berganda

Pada penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4
Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	154.009	62.229		2.475	.020
(X)	-3.605	1.410	-.3250	2.557	.017
(M1)	-2.279	.899	-.1741	2.534	.018
(M2)	-2.141	1.090	-.2136	1.965	.061
(M3)	-.427	.837	-.635	-.510	.614
X.M1	.070	.027	2.068	2.584	.016
X.M2	.075	.033	2.768	2.300	.030
X.M3	.011	.019	.858	.555	.584

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 20

Hasil Uji t

Acuan dalam pengujian hipotesis ini adalah. Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $p\ value < \alpha$, maka hipotesis diterima. Dan sebaliknya jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $p\ value > \alpha$, maka hipotesis ditolak.

Pengujian Hipotesis Pertama

Dari table 4 dapat dilihat nilai t hitung sebesar -2.557 dan t table

sebesar 2.048 dan p value (sign) 0,017 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hasil penelitian menemukan bahwa Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara negative terhadap pengawasan keuangan daerah.

Anggota dewan tidak selalu paham tentang anggaran namun rutinitas kerja dan pengalaman kerja menjadi media pembelajaran yang lebih efektif dalam pengawasan keuangan daerah (APBD, mekanisme kerja yang dilakukan oleh anggota dewan memberikan kontribusi dan media pembelajaran yang lebih efektif daripada sekedar pengetahuan dewan tentang anggaran. Dengan demikian **H₀₁ ditolak dan H₁ diterima.**

Pengujian Hipotesis Kedua

Dari table 4 dapat dilihat nilai t hitung sebesar 2.584 dan t table sebesar 2.048 dan p value (sign) 0,016 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hasil penelitian menemukan bahwa Pengetahuan dewan tentang anggaran dengan political background sebagai pemoderasi berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah, **H₀₂ ditolak dan H₂ diterima.**

Syahrudin dan Taifur (2001) menyatakan bahwa kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsinya tidak saja ditentukan oleh kualitas anggota DPRD yang ada, tetapi dipengaruhi pula oleh perilaku (moral) anggota DPRD. La Palombara (1974) menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku dan peran legislatif, yaitu institusi politik, partai politik, karakteristik personal (latar

belakang, sosialisasi, nilai & ideologi), pengalaman politik dan sifat pemilih. Sedangkan Yudoyono (2000) juga menyatakan bahwa DPRD akan dapat memainkan peranannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi ideal, dalam arti memahami benar hak, tugas, dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang memadai.

Syahrudin dan Taifur (2001) menyatakan bahwa kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsinya tidak saja ditentukan oleh kualitas anggota DPRD yang ada, tetapi dipengaruhi pula oleh perilaku (moral) anggota DPRD. La Palombara (1974) menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku dan peran legislatif, yaitu institusi politik, partai politik, karakteristik personal (latar belakang, sosialisasi, nilai & ideologi), pengalaman politik dan sifat pemilih. Sedangkan Yudoyono (2000) juga menyatakan bahwa DPRD akan dapat memainkan peranannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi ideal, dalam arti memahami benar hak, tugas, dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang memadai.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian Murni dan Witono (2003) Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Political Background sebagai pemoderasi berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Pengujian Hipotesis Ketiga

Dari table 4 dapat dilihat nilai t hitung sebesar 2.300 dan t table sebesar 2.048 dan p value (sign) 0,030 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hasil penelitian menemukan bahwa Pengetahuan dewan tentang anggaran dengan akuntabilitas sebagai pemoderasi berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah, **H₀₃ ditolak dan H₃ diterima.**

Adanya akuntabilitas publik yang baik dalam menjaga kualitas pengawasan terhadap APBD, maka pengawasan terhadap APBD juga akan semakin baik seperti hasil penelitian Novatiani dan Lestari (2014) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengawasan anggaran. Penelitian (Coryanata, 2007; Sopanah dan Wahyudi, 2007), menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan APBD dimoderasi oleh akuntabilitas. Hal ini peneliti menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam pengawasan APBD karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang di anggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang adakarena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat.

Pengujian Hipotesis Keempat

Dari table 4 dapat dilihat nilai t hitung sebesar 0.555 dan t table sebesar 2.048 dan p value (sign) 0,584 yang artinya lebih besar dari

0,05. Dengan demikian, hasil penelitian menemukan bahwa Pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderasi tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah, **H₀₄ diterima dan H₄ ditolak.**

Hasil penelitian konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sopanah dan Mardiasmo (2003) dan Simson (2005). Peneliti sependapat dengan dengan penelitian terdahulu bahwa “Transparansi kebijakan public masih dalam tahap wacana” dan “implementasinya masih dalam tahap formalitas”. Hasil penelitian ini konsisten dengan teori persepsi yang dikemukakan oleh Robbins (1987) dalam Simson (2005) yang menyatakan bahwa persepsi antara satu individu dengan individu lain sangatlah mungkin memiliki perbedaan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil Uji R² dan Uji F pada Penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.807 ^a	.651	.553	4.273	1.902

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2016

Dari tabel 5, perhitungan nilai koefisien determinasi (R²) diperoleh nilai sebesar 0.807. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen memberikan pengaruh sebesar 80.7% terhadap dependen dan sisanya dipengaruhi oleh

variabel-variabel lain yang tidak termasuk kedalam penelitian ini.

Tabel 6
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	F	Sig.
Regression	6.666	.000 ^b
1 Residual		
Total		

Sumber: Olah Data SPSS, 2016

Dari Tabel 6 diperoleh nilai signifikansi sig sebesar 0,000 < 0.05, dan F hitung > F tabel yaitu 6.666 > 2.54, sehingga semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang anggaran berpengaruh negative dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Dari ketiga variabel moderating yang dapat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD) adalah political background dan akuntabilitas, sedangkan transparansi tidak berpengaruh.

Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah untuk dapat menambah variabel dan mempeluas sampel yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu R, Arini, 2013, *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap*

- Pengawasan Keuangan Daerah Di Kabupaten Sukoharjo*, Naskah Publikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Devi, Yulinda dan Andriyani, Lilik. 2010. *Hubungan Determinasi Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi empiris pada DPRD Kabupaten Karesedinan Kedu (Studi Kasus di Karesidenan Kedu 2010). Prosiding SNA XIII Purwokerto*: Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Ghozali, imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. 18. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, 2006, *Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Kartikasari, Dewi. 2012. *Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali)*”. *Accounting Analysis Journal*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Koryanata, Isma. 2007. *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Kota Bengkulu*.
- Krisna, 2014, *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, dan Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris Pada DPRD Kota Pati Jawa Tengah)*, Naskah Publikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mardiasmo. 2005. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Murni, Sri dan Banu Witono. 2004. *Pengaruh Personal Background dan Political Background terhadap peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. *Jurnal Perspektif*, Vol. 9.
- Nisa, Choyrun, 2016, *Pengaruh personal background dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (Studi empiris terhadap DPRD Kabupaten Bayuwangi)*: Universitas Jember.
- Novatiani, R. Ait dan dan Nurmalita Lestari, 2014, *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di*

- DPRD Kota Bandung, www.journal.widyatama.ac.id.
- Pramono, Agus H., 2002, *Pengawasan Legislatif terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang.
- Sopannah dan Mardiasmo. 2003. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya.
- Werimon, dkk. 2007. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Study Empiris Di Provinsi Papua)*. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Provinsi Papua.
- Winarna, Jaka dan Murni, Sri. 2007. *Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006)*. *Prosiding SNA X*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Yudoyono, Bambang. 2008. *Otonomi Daerah*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.